

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal diterapkannya otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan adanya masa transisi perubahan sistem pemerintah, yang sebelumnya sistem pemerintah bersifat sentralistik diubah menjadi sistem pemerintah yang bersifat desentralistik. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola serta mengatur keuangan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, transparan, dan bertanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah berupa Dana bagi hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam rangka membantu pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah.

Tujuan utama ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya untuk memberikan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang utama adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan, sehingga mendorong pemerintah daerah dalam memberdayakan semua potensi yang ada dalam rangka mengembangkan dan

membangun daerahnya. Dengan memaksimalkan sumber potensi yang dimiliki, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat atau provinsi dapat berkurang. Pemerintah daerah memang seharusnya dapat mandiri dalam membiayai kegiatan dan pembangunan di daerahnya, dengan begitu otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik (Halim, 2008).

Untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah diperlukan pengukuran kinerja keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Untuk mewujudkan kinerja keuangan yang optimal, maka pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara benar. Salah satu upayanya adalah dengan cara menyusun anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan ukuran dalam mencapai tujuan.

Keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam era otonomi daerah. Di Indonesia anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. APBD berisi tentang rencana keuangan tahunan atau daftar yang terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah agar dapat berjalan sesuai rencana yang telah disepakati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat penting di dalam pemerintah daerah. Hal ini terkait karena adanya dampak APBD terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan tugas pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu APBD perlu adanya publikasi, hal ini bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, transparansi kepada masyarakat, serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menunjukkan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah atas sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk dikelola dan menyajikan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan (Jusmawati, 2011). Pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pihak yang diberikan tugas untuk menjalankan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah wajib menyampaikan laporan keuangan daerahnya untuk dinilai, apakah telah berhasil atau tidak dalam mengelola keuangan daerahnya.

Analisis keuangan adalah suatu proses mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan atas laporan keuangan yang telah tersedia. Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio derajat desentralisasi.

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD.
3. Mengukur aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Rasio pertumbuhan untuk melihat perkembangan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
5. Derajat desentralisasi untuk mengukur kontribusi PAD dalam menopang total pendapatan daerah.

Analisis rasio terhadap APBD sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, analisis rasio juga digunakan untuk menilai efektivitas otonomi daerah, sebab dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah mendapatkan keleluasaan penuh untuk mengelola keuangan daerahnya. Seharusnya dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah (Jusmawati, 2011).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diukur dengan menggunakan analisis rasio pada APBD Tahun Anggaran 2009-2011. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ekawarna *et al* (2009) yang mengemukakan bahwa di

Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun Anggaran 2004-2006 secara umum menggambarkan kinerja yang kurang baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan dengan rasio efisiensi rendah, rasio efektivitas tinggi, dan rasio pertumbuhan selalu meningkat. Pada rasio aktivitas menghasilkan persentase yang rendah karena alokasi dana APBD untuk pembangunan relatif kecil dibandingkan dengan anggaran operasional, untuk rasio kemandirian yang dihasilkan juga rendah dengan tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal tinggi. Perbedaan dengan penelitian Ekawarna *et al* (2009) bahwa penelitian sekarang mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo, tahun anggaran 2009-2011 dan alat analisis yang digunakan menambah satu rasio yaitu rasio derajat desentralisasi.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo dilihat dari rasio pada APBD tahun 2009-2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD tahun 2009-2011.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah selanjutnya.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang kinerja keuangan dan bahan pengembangan bagi penelitian yang sejenis.

E. Sistematika Penulisan

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini memuat teori-teori yang relevan meliputi otonomi daerah, pengukuran kinerja, tinjauan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), analisis rasio keuangan, dan penelitian terdahulu.

BAB III merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV merupakan analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi pembahasan hasil yang diperoleh dari analisis rasio yang telah dilakukan dan gambaran umum kabupaten Sukoharjo.

BAB V merupakan penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi, keterbatasan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.